KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

EPAPER www.kr.co.id

BERLANGGANAN SCAN BARCODE

SABTU PAHING | 21 JANUARI 2023 (28 JUMADILAKIR 1956 / TAHUN LXXVIII NO 114) | HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

KR-Antara/Indrianto Eko Suwarso

***PERSIAPAN IMLEK:** Pekerja menata lampion di Wihara Amurva Bhumi, Jakarta, Jumat (20/1/2023). Berbagai penataan dan persiapan perlengkapan ibadah dilakukan pengurus wihara menyambut Tahun Baru Imlek 2574 yang jatuh pada Minggu (22/1/2023).*

Tiga di Yogya, 14 di Jateng

108 Lembaga Zakat Tak Berizin

JAKARTA (KR) - Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan daftar lembaga pengelola zakat yang didata hingga Januari 2023. Di tingkat pusat, ada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sedangkan, di tingkat provinsi sudah terbentuk 34 Baznas dan 464 Baznas kabupaten/kota.

"Kemenag mencatat ada 37 Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional, 33 LAZ Skala Provinsi, 70 LAZ Skala Kab/Kota yang memiliki izin legalitas dari Kemenag," terang Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Jumat (20/1).

Di bagian lain, ada 108 lembaga yang telah melakukan aktivitas pengelolaan zakat, namun tidak memiliki izin legalitas dari Kemenag. Dari 108 lembaga amil zakat yang sudah melakukan pengelolaan, meski tanpa izin sesuai regulasi tersebar di sejumlah daerah, termasuk di Yogyakarta. Di daerah ini terdapat 3 lembaga pengelola zakat tanpa izin. Sedangkan, di Jateng ada 14 lembaga.

Kamaruddin menegaskan, tata kelola zakat di Indonesia diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 18 ayat (1) UU 23/2011 mengatur, Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sementara pada ayat (2) mengatur, izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan. "Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin wajib segera melakukan proses perizinan sesuai prosedur pedoman pemberian izin pembentukan LAZ," tegas Kamaruddin.

Ia juga menyatakan, lembaga pengelola zakat yang tidak berizin sesuai UU Zakat No 23 Tahun 2011, wajib menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakat. Pasal 38 menegaskan, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Dikatakan Kamaruddin, pihaknya sengaja merilis daftar pengelola zakat yang berizin dan tidak berizin. Hal itu sebagai bagian dari upaya melakukan pengamanan dana sosial keagamaan zakat, infak dan sedekah serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan pengelolaan dana tersebut.

* **Bersambung hal 7 kol 5**

PENGURUS KAGAMA DIY DAN SLEMAN DIKUKUHKAN

Siap Bersinergi dan Memberikan Solusi

SLEMAN (KR) - Pengurus Daerah (Pengda) Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) DIY dan Pengurus Cabang (Pengcab) Kagama Kabupaten Sleman, periode 2022-2027 dikukuhkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Kagama Ganjar Pranowo di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Jalan Palagan Tentara Pelajar, Ngaglik Sleman, Jumat (20/1). Pengukuhan ditandai dengan penyematan pin kepada Ketua Pengda Kagama DIY Gatot Saptadi dan Ketua Pengcab Kagama Kabupaten Sleman Eka Suryo Prihantoro, dilanjutkan penandatanganan berita acara. Turut hadir Bupati Sleman Kustini dan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa. Acara pengukuhan mengusung tema 'Guyup Rukun Migunani'.

Ganjar mengapresiasi pengukuhan pengurus Kagama DIY dan Sleman yang dihadiri kepala daerah lengkap (Bupati dan Wabup Sleman). "Suasana kebatinan (guyup, rukun, migunani) harus dikedepankan agar organisasi Kagama terus berkembang. Agar sebuah organisasi terus hidup, kuncinya para anggotanya merasakan bahagia, dan itu bisa dicapai melalui peminatan," katanya.

Ganjar juga mengapresiasi komitmen Kagama DIY dan Sleman yang akan terus meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak terutama UGM dan pemerintah daerah. "Anggota Kagama itu memiliki banyak ide cerdas dan inovasi teknologi tepat guna

* **Bersambung hal 7 kol 1**

KR-Devid Permana

Ganjar Pranowo mengukuhkan Pengurus Kagama DIY dan Sleman.

MAHFUD JAMIN SIDANG SAMBO INDEPENDEN

Tak Terpengaruh Gerakan Bawah Tanah

JAKARTA (KR) - Menko Polhukam Mahfud MD memastikan kejaksaan tidak terpengaruh gerakan-gerakan bawah tanah terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) dengan terdakwa Ferdy Sambo (FS). Menurut Mahfud, ada yang bergerilya ingin FS dibebaskan, ada pula yang ingin FS dihukum, tapi pihaknya bisa mengamankan hal tersebut dengan menjamin independensi kejaksaan.

"Saya pastikan kejaksaan independen, tidak akan terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu," kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jumat (20/1).

Mahfud menyebutkan, ada yang bilang soal brigjen mendekati A dan B. "Brigjennya siapa saya suruh sebut ke saya, nanti saya punya mayjen banyak. Kalau Anda punya mayjen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya letjen. Jadi pokoknya independen saja," tegasnya.

* **Bersambung hal 7 kol 5**

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
Sabtu, 21 Januari 2023	11:53	15:15	18:08	19:22	04:13

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

DUA pekan lagi ASEAN Tourism Forum (ATF) bakal digelar di Yogyakarta, tepatnya 2 - 5 Februari. Yogyakarta dipilih menjadi lokasi pertemuan tahunan tingkat Menteri Pariwisata Negara Asia Tenggara, karena dipandang sebagai salah satu destinasi wisata superprioritas. Tentu ini menjadi tantangan saat viralnya berita yang dirilis BPS di awal tahun 2023 tentang DIY menjadi daerah paling miskin di Jawa dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional sebesar 9,57%.

Berita ini cocok juga dengan tema ATF, 'ASEAN- Empower Talents, Embrace Technology, Recover Tourismí. Cocok karena mewakili komitmen Indonesia dalam mempercepat pemulihan pariwisata dan menciptakan talenta yang berdaya saing dan profesional (www.indonesia.travel, 2022). Selain merupakan pertemuan National Tourism Organization (NTO), menteri dan pejabat pariwisata, juga ajang berkumpulnya peserta pameran, pembeli internasional, media internasional dan lokal serta pengunjung perdagangan di industri pariwisata.

ATF diawali dari pertemuan Negara ASEAN tahun 1976 membentuk Bali Concord yang merupakan kesepakatan kerja sama dengan negara anggota yang meliputi politik, keamanan, ekonomi dan pariwisata. Kemudian pada tahun 1981 dibentuk suatu forum yang dinamai ASEAN Tourism Forum (ATF) di Genting Highland, Malaysia. ATF adalah kerja sama regional yang berupaya untuk mempromosikan wilayah ASEAN

* **Bersambung hal 7 kol 1**

DIY Miliki Karakteristik Tersendiri, Kemiskinan Jadi Anomali

YOGYA (KR) - DIY memiliki persentase angka kemiskinan yang tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebaliknya angka harapan rata-rata lama sekolah, indeks kesejahteraan, indeks kebahagiaan dan harapan hidup tinggi. Hal itu merupakan sebuah anomali yang terus terjadi di DIY, dimana indikator pembangunan yang cukup tinggi tidak sejalan dengan tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi.

Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono mengatakan, persentase penduduk miskin di DIY mencapai 11,49 persen dengan jumlah 463.630 orang pada September 2022. Capaian tersebut lebih tinggi dari rata-rata persentase kemiskinan nasional di angka 9,57 persen. Meski demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY sebesar 80,64 pada 2022. IPM DIY masuk kategori sangat tinggi dan tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.

Budiharto Setyawan

KR-Istimewa/Riyana Ekawati

Beny Suharsono

"Angka kemiskinan di DIY itu menunjukkan adanya kontradiksi paradoks alias anomali. Ada karakteristik tersendiri yang membedakan DIY dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini bisa dilihat salah satunya dari IPM, secara nasional IPM DIY tertinggi kedua di Indonesia," ujar Beny di Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (20/1).

Beny menyampaikan, IPM merupakan indikator resmi yang menggambarkan kualitas hidup manusia. Indikator IPM di antaranya, pertama kesehatan, yang dilihat dari usia harapan hidup DIY mencapai 75,08 tahun dan tertinggi di Indonesia. Kedua, pendidikan, dilihat dari harapan lama sekolah DIY tertinggi di Tanah Air mencapai 15,65 tahun. Dan yang paling menarik, ketiga, ekonomi. Dilihat dari pengeluaran perkapita DIY sebesar 14,48 juta, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta yang mencapai 18,92 juta.

"Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2022 sebesar 11,49 persen (yoy) menurun 0,42 persen dibandingkan September 2021, namun naik 0,15 persen (qtq) dibandingkan Maret 2022. Yang tiga bulan terakhir naik dari 11,34 persen ke 11,49 persen maka diproklamasikan DIY termiskin se-Pulau Jawa. Mohon tidak dibaca sepenggal dan mohon diingat ini kan statistik soal angka serta dapat melihat pada angka-angka yang lain, sehingga sering disebut kontradiksi paradoks," ungkapnya.

Fakta lainnya menunjukkan statistik yang sama misalnya usia harapan hidup, angka kebahagiaan, angka harapan rata-rata lama sekolah, indeks kesejahteraan. Apa mungkin jika angka kemiskinan ekstremnya tertinggi angka-angka lainnya tidak menjadi bagian dari pertimbangan? Meskipun kemiskinan DIY merupakan sebuah anomali,

* **Bersambung hal 7 kol 1**

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● **BELUM lama ini saya melayat warga Tionghoa yang meninggal dalam usia 109 tahun. Di rumah duka, saya heran karena semua keluarga Almarhumah memakai baju merah. Saya pikir, mereka salah kostum. Ternyata menurut tradisi Tionghoa, kalau warga meninggal di atas usia 80 tahun dianggap mendapat 'bonus' dan harus 'dirayakan'. Saya tambah bingung, harus mengucapkan selamat atau ikut berduka cita? (Hendro Wibowo, Jalan P Diponegoro 122 Kutoarjo 54212)-f**

Tidak Terbit:

SEHUBUNGAN Minggu (22 Januari 2023) besok merupakan Hari Libur Nasional Tahun Baru Imlek 2574, maka SKH *Kedaulatan Rakyat* tidak terbit. *KR* akan mengunjungi pembaca kembali, Senin (23 Januari 2023). Pembaca, pemasang iklan dan relasi harap maklum. **(Penerbit)-d**